

**PENGARUH AKUNTABILITAS VERTIKAL DAN  
AKUNTABILITAS HORIZONTAL TERHADAP LAPORAN  
ASURANS INDEPENDEN DANA KAMPANYE  
(Studi pada Parpol X dan Y di Jawa Timur dalam Pemilu 2019)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AYUNDA NUR RIZKYAH**

**NIM : G72216028**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayunda Nur Rizkyah  
NIM : G72216028  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas  
Horizontal Terhadap Laporan Asurans Independen Dan  
Kampanye (Studi pada Parpol X dan Y di Jawa Timur  
dalam Pemilu 2019)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2020

Yang menyatakan



Ayunda Nur Rizkyah

G72216028

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ayunda Nur Rizkyah NIM. G72216028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 15 Juni 2020

Pembimbing



Hastanti Agustin Rahayu, M.Acc

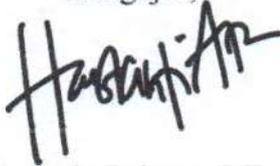
NIP. 198308082018012001

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayunda Nur Rizkyah NIM. G72216028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Sidang Munaqosah Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Akuntansi.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Hastanti Agustin Rahayu, S.E. M.Acc. Ak. CA. BKP

NIP. 198308082018012001

Penguji II,



Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

NIP. 201603311

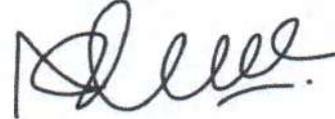
Penguji III,



Binti Shofiatul Jannah, SE. M.S.A. CSRS., CSRA

NIP. 199007292019032022

Penguji IV



Ade Irma Suryani Lating, M.S.A

NIP. 199110012019032020

Surabaya, 7 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Arifin, MM.,

NIP. 196212141993031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYUNDA NUR RIZKYAH

NIM : G72216028

Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI

E-mail address : ayundanuriz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENGARUH AKUNTABILITAS VERTIKAL DAN AKUNTABILITAS HORIZONTAL

TERHADAP LAPORAN ASURANS INDEPENDEN DANA KAMPANYE

(Studi pada Parpol X dan Y di Jawa Timur dalam Pemilu 2019)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2020

Penulis

(Ayunda Nur Rizkyah)



























































## B. Penelitian Terdahulu yang relevan

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 Partai Politik di Kota Bandung)	2015	Yuni Handayani	Akuntabilitas laporan keuangan partai politik sebagai variabel independen, dan metode penelitian.	Variabel dependen adalah pengelolaan keuangan partai politik, objek penelitian ditujukan kepada parpol, dan data yang digunakan adalah berupa kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan partai politik, namun transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan partai politik. Dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan partai politik
2.	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Partai Politik dalam Menyusun Laporan Dana Kampanye Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009	2009	Sugiono Paulus	Akuntabilitas partai politik sebagai variabel independen, metode penelitian, dan terdapat penjelasan terkait audit dana kampanye.	Variabel dependen, objek penelitian ditujukan kepada parpol, meskipun membahas audit dana kampanye tetapi tidak ada pembahasan yang terkait opini audit dana kampanye.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye, sementara itu akuntabilitas tidak

						memengaruhi efektivitas prosedur audit dalam laporan dana kampanye.
3.	Analisa Tingkat Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Berdasarkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014	2015	Iwan Sugiwa, Muthia Putri Arifah, dan Hasan Kamal Farobi	Pembahasan terkait kepatuhan laporan dana kampanye parpol yang dilihat dari hasil audit laporan dana kampanye.	Metode penelitian yang digunakan, objek penelitian, dan kurangnya penjelasan terkait akuntabilitas laporan dana kampanye.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 92% dari 5 partai politik di kabupaten/kota di provinsi Bali telah memenuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan dan pelaporan sumbangan dana kampanye pada pemilu legislatif 2014.
4.	Analisis Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye Pilkada 2018 dalam Perspektif PKPU No. 5 Tahun 2017 (Studi Kasus Hasil Audit KAP RAS Terhadap Paslon No 3 Calon Bupati Sukamara)	2019	Muhammad Habibi	Adanya pembahasan mengenai kepatuhan laporan dana kampanye yang telah di audit oleh KAP	Perspektif dalam penelitian ini berdasarkan PKPU No. 5 Tahun 2017 dan metode penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan dana kampanye dari paslon no.3 pilkada Sukamara tahun 2018 belum masuk kategori patuh secara keseluruhan.
5.	Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Sidoarjo)	2018	Bayu Nurcahyo Andini, Frenqui Monteiro, dan Soebandi	Adanya pembahasan terkait kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye.	Metode penelitian adalah kualitatif dan objek penelitian dilakukan di KPU bukan di KAP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 12 partai politik yang melanggar hukum dengan tidak menerapkan prinsip transparan dan akuntabel kepada publik

						dalam pelaporan dana kampanye partai politik.
6.	Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Hibah Pilkada dan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2015 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli)	2017	I Gede Aristana Diputra, Gede Adi Yuniarta, dan Edy Sujana	Pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam laporan dana kampanye	Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan dana kampanye bupati dan pilkada bukan pileg, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paslon bupati dan wakil bupati di kabupaten Bangli telah melaporkan pengelolaan anggaran hibah dalam pelaksanaan pilkada secara transparan dan akuntabel.
7.	Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018	2018	Hermansyah Putra	Adanya pembahasan terkait dimana para peserta pemilu dituntut agar bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran dana kampanye.	Hasil penelitian lebih ditujukan kepada peserta pilkada dan kurangnya penjelasan terkait audit dana kampanye	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye sangat penting, karena laporan tersebut akan di audit oleh KAP untuk memastikan laporan yang di serahkan memenuhi aspek kepatuhan atau tidak.
8.	Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK	2017	Yayuk Alfi Rohmah, Artie Ardhitia R., Dian Nirmala Dewi	Pemeriksaan laporan dana kampanye oleh Calon pilkada telah sesuai dengan prosedur audit yang ditentukan oleh KPU yang meliputi pengujian asersi	Tidak ada pembahasan mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan dana kampanye	Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana prosedur-prosedur yang dilakukan auditor untuk mengaudit

				terhadap Laporan Dana Kampanye.		laporan dana kampanye calon kepala daerah.
9.	Peran Auditor Atas Hasil Audit Dana Kampanye Melalui Prosedur Audit Pada Pemilihan Kepala Daerah	2018	Eka Sri Nurhayati	Sama-sama ada pembahasan terkait audit dana kampanye yang dilakukan berdasarkan standar dan aturan yang diberikan oleh KPU	Metode penelitian dilakukan dengan wawancara, objek penelitian dilakukan di KPU dan kurangnya pembahasan mengenai akuntabilitas laporan dana kampanye oleh peserta pemilu.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur audit dana kampanye pada pilkada terdiri atas: pengujian asersi, periode pencatatan dan pelaporan, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10	Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)	2015	Fitriyah	Adanya pembahasan terkait pengelolaan keuangan politik pada pemilihan umum.	Objek penelitian ini adalah pilkada bukan pileg, tidak ada pembahasan mengenai dana kampanye, dan berfokus pada pengelolaan uang politik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan politik uang dalam pilkada dan pilkades, salah satunya ketika uang itu didistribusikan dan yang bertanggungjawab adalah anggota kampanye.

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian oleh Yuni Handayani (2015); Sugiono Paulus (2009); Iwan Sugiwa, dkk. (2015); Muhammad Habibi (2019); Bayu Nurcahyo, dkk. (2018); I Gede Aristana, dkk. (2017); Hermasyah Putra (2018); Yayuk Alfi, dkk. (2017); Eka Sri Nurhayati (2018); Fitriyah (2015).















Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas. Akuntabilitas horizontal dalam penelitian ini menjadikan transparansi sebagai proksi. Laporan keuangan yang disampaikan tidak boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda waktu penyampaiannya. Penelitian ini memproksikan akuntabilitas horizontal dengan transparansi.

Transparansi dapat dijadikan proksi dalam variable akuntabilitas horizontal yang pengukurannya dengan menghitung jumlah asersi transparansi dalam kertas kerja opini audit yang mendapatkan opini patuh.

#### **F. Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa hasil audit laporan dana kampanye dari partai politik kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pileg tahun 2019 atau Hasil Opini Audit Laporan Dana Kampanye. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan hasil audit atau laporan asurans independen dana kampanye parpol pada pileg 2019 yang telah diberikan oleh KAP kepada KPU.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi lapangan. Dengan cara melakukan peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan

data utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengambil laporan asuransi independen dana kampanye di KAP yang telah ditunjuk KPU untuk mengaudit laporan dana kampanye partai politik.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah metode analisis yang digunakan untuk menguji keterkaitan atau peluang antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis data dilakukan bertujuan untuk memberi jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis yang sudah diajukan. Setelah itu, hasil analisis data diinterpretasikan dan ditarik kesimpulannya.

1. Uji Asumsi Klasik
  - a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat melalui grafik plot Normalitas atau uji *One Sample Kolmogrov Smirnov*. Kriteria hasil pengujian normalitas dengan uji *Kolmogrov Smirnov* adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$ , maka data tidak berdistribusi normal.





















Penjelasan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Koefisien konstanta sebesar 3,585 yang artinya jika akuntabilitas vertikal ( $X_1$ ) dan akuntabilitas horizontal ( $X_2$ ) dianggap 0 maka nilai dari variabel laporan asurans independen ( $Y$ ) adalah sebesar 3,585.
  - b. Koefisien dari regresi variabel akuntabilitas vertikal ( $X_1$ ) sebesar 0,117 yang artinya jika variabel akuntabilitas vertikal mengalami peningkatan sebesar 1 dan variabel independen lainnya tetap, maka variabel laporan asurans independen dana kampanye ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,117. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas vertikal terhadap laporan asurans independen dana kampanye.
  - c. Koefisien dari regresi variabel akuntabilitas horizontal ( $X_2$ ) sebesar 0,049 yang menunjukkan terdapat pengaruh positif, jika variabel independen lainnya tetap dan akuntabilitas horizontal mengalami peningkatan sebesar 1, maka variabel laporan asurans independen dana kampanye ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,049.
3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menguji berapa besar variabel independen ( $X$ ) dapat mempengaruhi variabel dependen ( $Y$ ). Berdasarkan output spss, diperoleh hasil koefisien determinasi sebagai berikut:











menetapkan prinsip dasar dan prosedur serta menyediakan panduan bagi auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang telah dilakukan oleh seseorang maupun organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui suatu laporan atau media yang dilakukan secara periodik kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder yang berupa laporan asurans independen atau keseluruhan dari kesimpulan opini auditor dalam audit laporan dana kampanye yang didapatkan dengan meminta data kepada KAP. Berdasarkan hasil *purposive sampling* terdapat 76 laporan yang menjadi sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda dengan beberapa uji asumsi klasik melalui *software* SPSS 21. Adapun penjelasan dari hasil penelitian secara parsial dan secara simultan yakni sebagai berikut:

1. Pengaruh Akuntabilitas Vertikal terhadap Laporan asurans independen dana kampanye partai politik

Berdasarkan hasil output spss untuk hipotesis ini, diperoleh bahwa nilai  $T_{hitung}$  sebesar  $4,258 > T_{tabel}$  sebesar  $1,292$  dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas vertikal berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai politik. Hasil uji tersebut mendukung hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa “akuntabilitas vertikal berpengaruh terhadap laporan



laporan asurans independen dana kampanye tidak banyak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kepatuhan yang memiliki arti untuk tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dalam menyampaikan laporan keuangan berarti harus menaati standar atau hukum yang telah diatur oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, laporan dana kampanye yang disusun oleh partai politik harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditentukan oleh KPU. Apabila laporan dana kampanye partai politik disusun hanya sebagai formalitas atau tidak sesuai dengan peraturan KPU maka pihak KAP akan memberikan opini tidak patuh dalam laporan asurans independen dana kampanye partai politik. Banyaknya opini tidak patuh yang didapatkan oleh partai politik tentunya akan dipandang buruk oleh masyarakat, dan masyarakat akan menganggap bahwa partai tersebut tidak layak untuk dipilih sebagai pemimpin dalam pemerintahan.

## 2. Pengaruh Akuntabilitas Horizontal terhadap Laporan asurans independen dana kampanye partai politik

Berdasarkan hasil output spss untuk hipotesis ini menunjukkan bahwa  $T_{hitung}$  1,827 lebih besar dari  $T_{tabel}$  1,292 dengan nilai signifikansi  $0,070 < 0,05$ . Hasil penelitian ini tidak didukung oleh hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan “akuntabilitas horizontal berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai politik”. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas horizontal atau transparansi tidak berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai

politik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Handayani, bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan partai politik, karena nilai signifikansi untuk transparansi dalam penelitian Yuli sebesar 0,614. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiono Poulus yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit laporan dana kampanye.

Hasil pengujian hipotesis ini menyatakan bahwa semakin transparan laporan dana kampanye yang disampaikan oleh partai politik tidak akan mempengaruhi banyaknya opini tidak patuh yang diberikan oleh pihak KAP. Variabel akuntabilitas horizontal atau transparan tidak dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan opini patuh dan tidak berpengaruh mengurangi basis adanya ketidakpatuhan dalam laporan asurans independen dana kampanye partai politik. Transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran partai politik dinilai masih buruk, hal ini terbukti berdasarkan peneliti Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa laporan keuangan parpol yang bersumber dari negara sudah secara patuh dilaporkan oleh parpol kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>44</sup> Transparansi laporan dana kampanye merupakan faktor penting dalam demokrasi khususnya pada pemilu. Namun transparansi juga masih menjadi permasalahan besar dalam parpol karena kondisi demokrasi

---

<sup>44</sup> Bayu Nurcahyo, Monteiro, and Soebandi, "Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo)."







2. Akuntabilitas Horizontal ( $X_2$ ) secara parsial tidak berpengaruh terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai politik (Y). Hal ini didukung dengan nilai signifikansi sebesar  $0,070 > 0,05$  dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,837 < T_{tabel}$  sebesar 1,292 yang menunjukkan bahwa transparansi atau pertanggungjawaban kepada publik belum bisa dijadikan acuan untuk mengurangi basis ketidakpatuhan dalam laporan asurans independen dana kampanye partai politik karena transparansi dalam pelaporan keuangan politik masih buruk.
3. Berdasarkan hasil uji simultan (uji f), akuntabilitas vertikal ( $X_1$ ) dan akuntabilitas horizontal ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap laporan asurans independen dana kampanye partai politik (Y). Dengan nilai signifikansi 0,000 yang tingkat signifikan ditingkat 0,05 dan nilai determinasi sebesar 0,651 atau 65%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal dapat meningkatkan opini patuh dalam laporan asurans independen dana kampanye partai politik.

## B. Saran

1. Bagi KPU diharapkan untuk memberi pelatihan dan sosialisasi terkait penyusunan laporan dana kampanye kepada partai politik agar partai politik dapat menyusun laporan dana kampanye sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Serta KPU harus memberikan sanksi tegas





- Prosedur Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu Legislatif 2009” (2009).
- Purwanto, Wahyudi. “Audit Compliance.” Last modified 2016. <http://spi.uinalauddin.ac.id/index.php/2016/11/14/audit-compliance/>.
- Rahardjo, Sahid. “Makna Koefisien Determinasi (R Square) Dalam Analisa Regresi Linier Berganda.” Last modified 2017. <https://www.spssindonesia.com>.
- Risianto, Christoforus. “Kejujuran Jadi Persoalan Mendasar Laporan Dana Kampanye.” Kompas.Com, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/03/14234591/kejujuran-jadi-persoalan-mendasar-laporan-dana-kampanye>.
- Rohmah, Yayuk Alfi, Artie Arditha R, and Dian Nirmala Dewi. “Prosedur Audit Dana Kampanye Untuk Calon Kepala Daerah Pada KAP ZK,” no. 8 (2016).
- Saleh, R. “Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta.” Simposium Nasional Akuntansi (2004).
- Simarmata, Markus H. “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum” 15, no. 01 (2018).
- Sugiwa, Iwan, Muthia Putri, and Hasan Kamal. “Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014” 14, no. 1 (2015).
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryani, and Hendryadi. Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Suswantoro, Gunawan. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Thoha, Miftah. Birokrasi Politik & Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Yeremia, Sukoyo, and Paath Carlos KY. “Akuntabilitas Dana Kampanye Lemah.” Last modified 2018. <https://www.beritasatu.com/politik/512437/akuntabilitas-dana-kampanye-lemah>.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dan Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2000.
- “PKPU No. 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilu” (2018).
- PP No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010.
- “SK No. 1781 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana

